

## Kartu Kendali Mitan Mulai Diterapkan

### ■ Warga Harus Mendaftar di Pangkalan

**BANDA ACEH** - Pemerintah mulai memberlakukan sistem penyaluran minyak tanah (mitan) bersubsidi melalui program kartu kendali. Untuk mendapatkan kartu kendali itu, warga harus mendaftar ke pangkalan mitan.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dr Ibrahim Hasyim mengatakan, saat ini diperkirakan

ada 19 ribu lebih kepala keluarga yang sudah terdaftar di Aceh Besar sebagai konsumen.

Program ini sudah mulai kita jalankan sejak 1 November. Selain Aceh Besar, ada juga dua kabupaten lain yang menjadi target kita, yakni Aceh Utara dan Banda Aceh. Tapi yang baru dimulai adalah wilayah Aceh Besar, sedangkan yang lainnya baru dalam tahap pendataan," ujarnya usai rapat koordinasi antara pengelola pangkalan minyak tanah, agen dan himpunan pengusaha minyak tanah dan gas (Hiswana Migas) di Banda Aceh, Jumat (21/11) kemarin.

Rapat koordinasi tersebut juga turut dihadiri unsur dari Pemkab Aceh Besar dan PT Pertamina (Persero) wilayah Aceh.

Menurut Ibrahim, sasaran dari program kartu kendali ini adalah kalangan rumah tangga dan usaha kecil yang terdapat di tiga kabupaten tersebut. Tidak dijelaskan apakah sudah ada anggota masyarakat yang menggunakan kartu kendali untuk mendapatkan mitan.

"Masyarakat tidak perlu membayar. Tapi mereka harus lebih dulu

mendaftarkan diri di pangkalan minyak tanah terdekat untuk mendapatkan kartu kendali ini," ujarnya.

Dia sebutkan, kartu kendali dapat digunakan di 78 pangkalan minyak tanah yang tersebar di seluruh Aceh Besar. Satu pangkalan dapat menampung sekitar 250 KK. Menurut Ibrahim, dari survey lapangan, rata-rata permintaan masyarakat terhadap minyak tanah menggunakan kartu kendali sangat bervariasi, antara 3 sampai 5 liter per orang setiap bulan.

Angka tersebut, kata Ibrahim, diambil berdasarkan hasil uji petik di beberapa pangkalan minyak tanah di Aceh Besar kemarin.

"Pada awalnya memang masyarakat masih menganggap program ini sesuatu yang baru. Tapi ke depan kita akan berusaha membahas lagi bagaimana mekanisme penyalurannya dan apa kendalanya di lapangan," jelas Ibrahim.

Dia menambahkan, salah satu tujuan dari program kartu kendali ini adalah untuk meminimalisir terjadinya minyak tanah oplosan dan kelangkaan persediaan dalam masyarakat. (sar)